

Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pagar Laut di Tangerang Banten pada Media Radarbanten.co.id

Aditia^{1*}, Muhammad Ruslan Ramli²

¹²Universitas Esa Unggul, Indonesia

*aditstar267@gmail.com

Abstract

Mass media play an important role in shaping social reality and influencing public understanding of public policy issues. In Banten Province, the construction of a sea fence in the coastal area of Tangerang has attracted attention and generated diverse responses, especially from fishing communities. This study aims to analyze how Radarbanten.co.id frames news coverage of the sea fence issue in Tangerang, Banten. Using a qualitative approach within a constructivist paradigm, the research applies Robert N. Entman's framing analysis model define problems, diagnose causes, make moral judgments, and suggest remedies. The object of analysis comprises Radarbanten.co.id news texts related to the sea fence published from January to February 2025. The findings show that Radarbanten.co.id frames the sea fence primarily as a coastal spatial management problem that affects fishing communities, while emphasizing policy and governance dimensions as well as the importance of protecting coastal community rights through law enforcement and policy evaluation.

Keywords: Media Framing, Sea Fence, Radarbanten.co.id, Coastal Communities

Abstrak

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial dan memengaruhi pemahaman publik terhadap isu kebijakan publik. Di Provinsi Banten, pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang menimbulkan perhatian dan beragam respons, terutama dari masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis framing pemberitaan kasus pagar laut di Tangerang, Banten, pada media Radarbanten.co.id. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, serta menerapkan analisis framing model Robert N. Entman yang mencakup empat elemen: *define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan suggest remedies*. Objek penelitian berupa teks berita terkait pagar laut yang dipublikasikan Radarbanten.co.id pada periode Januari hingga Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radarbanten.co.id membingkai isu pagar laut sebagai persoalan pengelolaan ruang pesisir yang berdampak pada masyarakat nelayan, dengan penekanan pada aspek kebijakan, tata kelola, serta pentingnya perlindungan hak masyarakat pesisir melalui penegakan hukum dan evaluasi kebijakan.

Kata kunci: Framing Media, Pagar Laut, Radarbanten.co.id, Masyarakat Pesisir

Pendahuluan

Media massa memiliki berbagai kepentingan yang meliputi aspek ekonomi, pengaruh pemilik modal, citra institusi media, serta kepentingan eksternal lainnya. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik perlu dikaji secara kritis agar dapat dipahami secara objektif. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepentingan-kepentingan tersebut terlihat dari masih minimnya sensitivitas publik terhadap potensi bias atau agenda tertentu dalam pemberitaan

media (Putri & Yusian, 2018) Kesadaran terhadap berbagai kepentingan ini menjadi hal penting dalam memahami proses konstruksi berita, karena cara informasi dipilih, disusun, dan disajikan tidak terlepas dari pengaruh kepentingan yang melatarbelakanginya.

Konstruksi pemberitaan tidak dapat dilepaskan dari teori framing, yaitu pendekatan yang menjelaskan bagaimana proses pendefinisian, penentuan, serta pengorganisasian realitas dilakukan sehingga membentuk cara pandang dan persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Teori ini menekankan peran media dalam memengaruhi cara khalayak memahami realitas sosial (Goffman, 1974). Selain itu, framing juga dipahami sebagai strategi penyajian informasi kepada pembaca atau pendengar yang dapat memengaruhi bagaimana informasi tersebut diterima, ditafsirkan, dan diproses oleh individu.

Berita merupakan salah satu konten utama dalam media massa selain pandangan atau opini. Berita dapat dipahami sebagai bentuk informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang disampaikan kepada khalayak luas melalui berbagai saluran komunikasi massa. (Efendi et al., 2023) menjelaskan bahwa berita adalah penyajian informasi kepada masyarakat melalui media massa, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

(Entman, 1993a) menjelaskan bahwa framing merupakan proses seleksi terhadap aspek-aspek tertentu dari suatu realitas yang kemudian ditonjolkan dalam teks media. Proses ini bertujuan untuk mendefinisikan masalah (*define problems*), mengidentifikasi penyebab (*diagnose causes*), memberikan penilaian moral (*make moral judgments*), serta menawarkan rekomendasi penyelesaian (*suggest remedies*). Dengan demikian, analisis framing menjadi penting untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas dan bagaimana konstruksi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi serta cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Lokus penelitian ini berfokus pada isu pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Laut Tanggerang, Banten. khususnya dalam pemberitaan yang dimuat oleh media lokal Radarbanten.co.id pada periode Januari hingga Februari 2025. Isu pagar laut menjadi sorotan karena menyangkut kebijakan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan tradisional.

Pembangunan pagar laut ini diklaim sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan mitigasi abrasi oleh pemerintah daerah dan beberapa pihak swasta yang berkepentingan. Namun, proyek ini memunculkan berbagai respon kritis dari masyarakat, terutama karena dianggap membatasi akses nelayan terhadap ruang tangkap dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka. Wilayah Tanggerang Banten dipilih sebagai lokus karena memiliki karakteristik sosial ekonomi pesisir yang kuat, dengan banyak komunitas yang menggantungkan hidup pada aktivitas kelautan dan perikanan. Selain itu, Radarbanten.co.id sebagai media lokal berperan penting dalam menyampaikan informasi, membentuk narasi, dan menjadi perantara antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah. Oleh

karena itu, wilayah ini relevan untuk dikaji dalam konteks analisis framing media terhadap konflik kebijakan pembangunan dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Pembangunan pagar laut sebagai struktur fisik di wilayah pesisir semakin marak dilakukan dalam berbagai proyek seperti tambak, reklamasi, hingga kawasan industri. Dalam konteks ini, pagar laut tidak sekadar berfungsi sebagai batas ruang, tetapi juga menjadi simbol pembatasan akses terhadap sumber daya kelautan oleh masyarakat pesisir. Studi Aulia et al., (2025) menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menyebabkan berkurangnya ruang tangkap nelayan, kerusakan lingkungan, serta munculnya konflik antara warga dan pihak pengembang.

Berdasarkan observasi awal dan penelusuran pemberitaan di media Radarbanten.co.id periode 10 Januari hingga 19 Februari 2025, penulis menemukan bahwa isu pagar laut mendapat porsi pemberitaan yang signifikan. Beberapa berita seperti "Patahan Pagar Laut Ganggu Perahu Nelayan", Radar Banten menyoroti keluhan nelayan atas sisa-sisa pagar laut yang masih menghalangi jalur perahu mereka (Radar Banten, 2025a). Selain itu, berita seperti "Ombudsman RI Endus Pelanggaran Pidana Dalam Kasus Pagar Laut di Tangerang" terbit pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 09:36:01 yang di dalamnya membingkai isu ini dalam konteks dugaan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat pesisir, memperkuat posisi warga sebagai korban kebijakan yang tidak berpihak (Radar Banten, 2025b).

Adapun beberapa jurnal yang mendukung penelitian ini sebagai berikut: (1) Analisis Framing Pemberitaan Konflik Rempang Eco City pada Media Batamnews.co.id dan Wartakepri.co.id UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024) (Syafiq, 2024). Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki (4 Dimensi Framing: Sintaksis, Tematik, Retoris, Skrip). Terdapat perbedaan framing antara kedua media; satu fokus pada pembangunan ekonomi, sementara yang lain lebih menekankan pada resistensi masyarakat lokal dan isu hak-hak adat. Framing ini memengaruhi persepsi publik terhadap proyek strategis nasional tersebut. (2) Analisis Perbandingan Framing Pemberitaan Kampung Bayam dalam Konflik Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mustakim, 2022). Robert N. Entman (4 Dimensi Framing: Definisi Masalah, Diagnosis Penyebab, Penilaian Moral, Rekomendasi Tindakan). Satu media fokus pada pembangunan infrastruktur dan kemajuan kota, sementara media lain lebih menekankan pada pelanggaran hak-hak warga dan ketidakadilan sosial akibat penggusuran. (3) Analisis Framing Berita Ibu Kota Nusantara di Kaltimtoday.co *Journals of Social, Science, and Engineering J.SST*, Vol 4 (2): 230-240, 2025 Universitas Fajar, Kota Makassar (Ariyani & Latief, 2025) Media Kaltimtoday.co cenderung membingkai pemberitaan tentang IKN secara positif, menyoroti upaya pemerintah dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan, meskipun ada beberapa artikel yang mencerminkan kritik dari masyarakat adat atas penggusuran dan hilangnya identitas budaya.

(4) Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Kulon Progo terkait Pembangunan Bandara YIA pada Medcom.id dan Tirto.id JSJ: *Jurnal Studi Journalistik*, 2 (1), 2020, 72-80 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Faujiah & Rubiyannah, 2020) Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki Medcom.id lebih pro-pemerintah dan menyajikan informasi bahwa kompensasi telah diberikan, sementara Tirto.id

cenderung pro-rakyat dan mengkritik kebijakan pembongkaran paksa serta dampak sosialnya. (5) Analisis Framing Pemberitaan Sengketa Gunung Kelud pada Media Online *kedirtribunnews.com* dan *blitartimes.com* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Hidayatulloh, 2020) Robert N. Entman Kedua media memberikan framing yang berbeda sesuai dengan wilayah yang mereka wakili. *Tribunnews.com* lebih condong mendukung Kabupaten Kediri, sementara *Blitartimes.com* lebih membela Kabupaten Blitar. Framing dilakukan melalui narasi sejarah, pidato tokoh daerah, dan rekomendasi solusi penyelesaian konflik

Kajian mengenai framing media telah banyak dilakukan untuk memahami bagaimana media massa mengonstruksi realitas sosial sekaligus memengaruhi persepsi publik terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan publik dan konflik sosial. Salah satu landasan teoretis utama dalam studi framing merujuk pada pemikiran (Entman, 1993), yang menjelaskan bahwa framing merupakan proses seleksi serta penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk definisi masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan rekomendasi penyelesaian. Konsep tersebut kemudian menjadi dasar teoretis yang banyak digunakan dalam penelitian analisis framing media.

Di Indonesia, kajian framing media dikembangkan lebih lanjut oleh (Eriyanto, 2012) yang menekankan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan turut membentuk realitas sosial melalui konstruksi wacana yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan, dan konteks institusional media. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan media merupakan hasil dari proses seleksi dan penekanan tertentu, bukan sekadar refleksi fakta.

Penelitian empiris terkait isu konflik agraria dan lingkungan juga menunjukkan kecenderungan serupa. (Putri & Yusian, 2018). menemukan bahwa media online membingkai konflik agraria sebagai persoalan kebijakan dan dampak sosial, dengan penekanan pada peran negara dan implikasinya terhadap masyarakat. Sementara itu, (Sari, 2024) menunjukkan bahwa media lokal cenderung menampilkan framing yang lebih dekat dengan kepentingan masyarakat terdampak dalam pemberitaan isu lingkungan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa framing media memiliki peran signifikan dalam membentuk wacana publik terkait konflik ruang serta kebijakan pembangunan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji framing media lokal terhadap isu pagar laut di kawasan pesisir Tangerang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis framing pemberitaan *Radarbanten.co.id* menggunakan model framing Entman. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian komunikasi, studi media lokal, serta isu pembangunan wilayah pesisir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan epistemologis. Paradigma tersebut memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat tetap, objektif, maupun tunggal, melainkan terbentuk melalui proses konstruksi

sosial yang dipengaruhi oleh konteks, pengalaman, serta interpretasi para aktor yang terlibat. Dengan perspektif ini, realitas dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan dapat berbeda tergantung pada cara individu maupun institusi memaknainya.

Pemilihan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mengkaji bagaimana media membentuk representasi realitas sosial, khususnya terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten, melalui praktik produksi dan penyajian berita. Proses framing yang dilakukan media memungkinkan adanya penekanan pada aspek tertentu dari suatu peristiwa, sehingga informasi disampaikan dalam sudut pandang tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara khalayak memahami dan menafsirkan isu yang diberitakan, sekaligus menunjukkan bahwa pemberitaan media tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang sarat makna. (Goffman, 1974)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif berupa tuturan lisan, teks tertulis, maupun perilaku yang diamati secara langsung (Moleong, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana media membentuk konstruksi sudut pandang tertentu terhadap kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Melalui metode kualitatif, penelitian tidak hanya menelaah isi faktual dalam pemberitaan, tetapi juga mengkaji proses penyusunan berita, aspek-aspek yang ditekankan, serta potensi pengaruhnya terhadap pembentukan persepsi pembaca.

Selain itu, penelitian kualitatif menempatkan data empiris sebagai dasar utama dalam pengembangan analisis, sementara teori digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, teori berfungsi sebagai seperangkat prinsip atau proposisi yang membantu menafsirkan temuan penelitian secara deskriptif maupun analitis, sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara sistematis dan mendalam. (Abdussamad, 2021).

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek atau sumber penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi serta analisis isi terhadap berita yang dipublikasikan oleh media daring Radarbanten.co.id dalam rentang waktu 12 Januari hingga 19 Februari 2025.

Adapun unit analisis yang digunakan berupa teks berita secara utuh yang dimuat dalam periode Januari hingga Februari 2025, khususnya pemberitaan yang mengangkat isu pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Pemilihan unit analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana media mengonstruksi narasi melalui pilihan bahasa, susunan struktur pemberitaan, serta penggunaan kutipan narasumber. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan secara mendalam terhadap cara media membentuk representasi isu tersebut. Rincian unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Berita utuh sebagai satuan utama untuk menganalisis struktur dan arah pembingkaihan yang dilakukan media.
2. Judul berita sebagai representasi awal dari masalah atau fokus utama yang ingin disorot oleh media.
3. Lead atau teras berita sebagai bagian pembuka yang berfungsi mengarahkan pembaca pada sudut pandang awal pemberitaan.
4. Paragraf-paragraf tematik yang mengandung elemen-elemen framing Robert Entman, yakni:
 - a. *Define Problems* (pendefinisian masalah),
 - b. *Diagnose Causes* (identifikasi penyebab),
 - c. *Make Moral Judgement* (penilaian moral), dan
 - d. *Suggest Remedies* (penyelesaian atau solusi yang ditawarkan).
5. Kutipan narasumber sebagai indikator posisi atau keberpihakan redaksi dalam membentuk opini pembaca.
6. Pilihan diksi dan gaya bahasa sebagai aspek linguistik yang menunjukkan framing secara implisit.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik utama yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, yaitu peneliti melakukan pengamatan serta analisis terhadap pemberitaan yang dipublikasikan oleh media Radarbanten.co.id tanpa terlibat langsung dalam proses produksi berita. Selain itu, data juga diperoleh melalui analisis dokumen, yang merupakan prosedur sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi berbagai dokumen dalam bentuk digital atau softcopy (Rahman et al., 2022). Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa kumpulan artikel berita dari Radarbanten.co.id yang membahas kasus pagar laut.

C. Keabsahan Data

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sebagai strategi untuk menguji keabsahan data. Penerapan triangulasi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu triangulasi data, triangulasi teori, dan triangulasi sumber. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data guna menilai konsistensi serta ketepatan temuan penelitian. Selanjutnya, triangulasi teori digunakan dengan memanfaatkan beragam perspektif teoretis yang relevan agar proses interpretasi data menjadi lebih komprehensif dan mengurangi potensi bias penafsiran. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan data yang berasal dari berbagai informan atau sumber informasi untuk memastikan validitas serta reliabilitas data yang diperoleh. Melalui penerapan ketiga pendekatan tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, validitas, dan ketelitian analitis yang lebih kuat.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik analisis data yang digunakan, penelitian ini menerapkan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga data mencapai titik kejenuhan, sehingga informasi yang diperoleh dinilai kredibel dan representatif. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan berita-berita Radarbanten.co.id periode Januari–Februari 2025 yang relevan dengan kasus pagar laut, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah pemahaman pola pemberitaan. Selanjutnya, melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, penelitian ini mengidentifikasi kecenderungan framing media dalam mengonstruksi realitas kasus tersebut. Dengan demikian, penggunaan model analisis interaktif memungkinkan peneliti memperoleh temuan yang sistematis, mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis framing menggunakan model Robert N. Entman, pemberitaan Radarbanten.co.id mengenai kasus pagar laut di wilayah pesisir Tangerang menunjukkan adanya pola framing yang relatif konsisten. Pada elemen *define problems*, Radarbanten.co.id mengonstruksikan kasus pagar laut sebagai permasalahan sosial yang berkaitan langsung dengan keterbatasan akses masyarakat nelayan terhadap ruang laut. Pagar laut diposisikan sebagai bentuk pembatasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan di wilayah pesisir.

Pada tanggal 19 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “penyegelan yang dilakukan KKP bukan hanya terkesan tergesa-gesa, tetapi juga mengabaikan keberlanjutan proyek strategis nasional yang telah dicanangkan pada era Presiden Joko Widodo dan ada motif bisnis”. Pada tanggal 22 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “ DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah maka berkewajiban mendukung dan mensukseskan program pemerintah, terlebih jika itu program Pemerintah Pusat, karena pemerintah provinsi itu kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.” Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Dia juga enggan dalam proses pembatalan SHM dan SHGB laut di Desa Kohod ini cacat hukum”. Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Kejagung RI berdasarkan surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor PRIN-01/F.2/Fd.1/01/2025, tanggal 21 Januari 2025, berisi, “Bersama ini kami minta bantuannya untuk dapat memberikan dokukumen berupa, Buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang dan dokumen lain yang terkait”.

Pada tanggal 27 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Ombudsman RI menuding jika aktivitas pemagaran laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang sebagai upaya penguasaan kawasan laut. Hal itu diperkuat dengan pengajuan hak tanah . di . Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. yang berujung

pada penerbitan. Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) juga Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak ratusan bidang di desa tersebut”. Pada tanggal 31 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat . hak guna bangunan (SHGB) dan. sertifikat hak milik (SHM) di wilayah .pagar laut yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang”

Pada tanggal 4 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “penyegelan yang dilakukan KKP bukan hanya terkesan tergesa-gesa, tetapi juga mengabaikan keberlanjutan proyek strategis nasional yang telah dicanangkan pada era Presiden Joko Widodo dan ada motif bisnis.”. Pada tanggal 16 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “ DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah maka berkewajiban mendukung dan mensukseskan program pemerintah, terlebih jika itu program Pemerintah Pusat, karena pemerintah provinsi itu kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.”. Pada tanggal 19 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Dia juga enggan dalam proses pembatalan SHM dan SHGB laut di Desa Kohod ini cacat hukum.

Pada elemen diagnose causes, Radarbanten.co.id mengaitkan munculnya permasalahan pagar laut dengan aspek kebijakan dan tata kelola wilayah pesisir yang dinilai belum berjalan secara optimal. Pemberitaan menyoroti lemahnya pengawasan serta dugaan ketidakteraturan administratif dalam pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, penyebab masalah tidak semata-mata diarahkan pada aktor individual, melainkan pada aspek struktural dan institusional. Pada tanggal 19 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Tangerang mendesak Pemerintah Kabupaten, Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat untuk membongkar pagar bambu di laut pesisir utara Tangerang sepanjang 30 km. Ketua SEMMI Indri Damayanthi menyebut bahwa pemerintah tidak .berniat .untuk menyelesaikan .permasalahan .nelayan”

Pada tanggal 22 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan SHGB dan SHM di .kawasan pagar laut di perairan Kabupaten .Tangerang, Banten cacat .prosedur. Nurson menyatakan ATR/BPN telah membatalkan .sertifikat tersebut”. Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Namun kata Nusron, untuk pembatalan SHM dan SHGB pada hari ini sekitar ada 50 yang dibatalkan. Dia juga enggan dalam proses .pembatalan SHM dan SHGB laut di Desa .Kohod. ini cacat hukum. Maka dari itu, pihaknya benar-benar selektif dalam .melakukan pengecekan SHM dan SHGB laut yang timbul di Desa ini”

Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “JS dicopot bersama lima pegawai .lainnya buntut .penerbitan Sertifikat .Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat .Hak Milik (SHM). di wilayah Pagar Laut, perairan. pantai Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, ramai diberitakan adanya penerbitan .SHGB untuk 263 bidang tanah di kawasan Pagar .Laut, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang”. Pada tanggal 27 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Surat Kejagung RI itu perihal permintaan agar Kades Kohod menyerahkan berkas terkait dengan keluarnya Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB). dan

Sertifikat Hak Milik (SHM) .beberapa bidang yang ada di pesisir laut di wilayah Desa Kohod pada tahun 2023 hingga 2024.

Pada tanggal 31 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Ombudsman Republik Indonesia menilai bahwa aktivitas pemagaran laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang diduga merupakan bentuk upaya penguasaan ruang laut. Dugaan tersebut semakin menguat seiring adanya pengajuan hak atas tanah di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, yang kemudian berujung pada penerbitan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut”. Pada tanggal 4 februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Tangerang mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, serta Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pembongkaran pagar bambu yang membentang sekitar 30 kilometer di wilayah pesisir utara Tangerang. Ketua SEMMI, Indri Damayanthi, menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan.

Pada tanggal 16 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut perairan Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami cacat prosedural. Ia juga menegaskan bahwa ATR/BPN telah mengambil langkah dengan membatalkan sertifikat-sertifikat tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Nusron Wahid menyampaikan bahwa hingga saat ini sekitar 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) telah dibatalkan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menyatakan adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, ATR/BPN melakukan proses verifikasi secara cermat dan selektif terhadap SHM dan SHGB yang muncul di wilayah laut Desa Kohod sebelum mengambil keputusan pembatalan.

Selanjutnya, pada elemen make moral judgments, Radarbanten.co.id menampilkan penilaian moral yang menekankan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat pesisir. Media cenderung menempatkan nelayan sebagai kelompok yang terdampak dan perlu mendapatkan perhatian dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan wilayah pesisir. Pada tanggal 19 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Keberadaan pagar laut di wilayah perairan pesisir berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan hingga 4 mil dari garis pantai”.

Pada tanggal 22 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai tidak hanya terkesan dilakukan secara terburu-buru, tetapi juga

dianggap kurang mempertimbangkan keberlanjutan proyek strategis nasional yang telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, muncul pula dugaan adanya kepentingan bisnis yang melatarbelakangi kebijakan tersebut". Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing "Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan peninjauan terhadap lokasi pagar laut di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada 24 Januari 2025. Setelah melakukan verifikasi dan memastikan bahwa area yang dipagari merupakan wilayah perairan laut, sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berada di sekitar kawasan tersebut kemudian dinyatakan batal".

Pada tanggal 24 Januari Radarbanten.co.id melakukan framing "Haerudin (47), seorang nelayan dari Desa Kohod, mengungkapkan rasa senangnya atas kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ke wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Kampung Alar Jiban merasa kecewa terhadap aparat desa Kohod karena dinilai kurang berpihak dan tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan warga setempat". Pada tanggal 27 Januari Radarbanten.co.id melakukan framing "Dalam kegiatan inspeksi mendadak tersebut, tim hanya menemukan keberadaan pagar laut yang terpasang di wilayah perairan Tangerang, tepatnya di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, Tim Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Polsus PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Perikanan Kabupaten Serang melakukan tindakan penyegelan terhadap pagar laut tersebut".

Pada tanggal 31 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing "Proses audit dilaksanakan dengan menginstruksikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) untuk memanggil Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam kegiatan pengukuran, serta pihak-pihak terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pemanggilan tersebut juga mencakup pejabat struktural, seperti kepala seksi dan mantan kepala kantor yang telah memasuki masa pensiun". Pada tanggal 4 Februari Radarbanten.co.id melakukan framing "Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor PRIN-01/F.2/Fd.1/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025, meminta dukungan berupa penyediaan dokumen terkait. Permintaan tersebut mencakup Buku Letter C Desa Kohod yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas lahan di area pemasangan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, serta dokumen lain yang relevan dengan proses penyelidikan".

Pada tanggal 16 Februari Radarbanten.co.id melakukan framing "Berdasarkan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat resmi yang seolah-olah diterbitkan oleh instansi atau pejabat berwenang dapat dikenakan sanksi pidana. Pembuatan atau pemalsuan surat dengan tujuan penggunaan tertentu diancam pidana penjara hingga 6 tahun. Apabila surat palsu tersebut digunakan untuk menipu, merugikan pihak lain, atau memperoleh keuntungan yang tidak sah, ancaman hukuman dapat

meningkat hingga 9 sampai 12 tahun. Selain itu, Pasal 264 KUHP juga mengatur sanksi terhadap pemalsuan dokumen otentik, seperti akta notaris dan berbagai surat resmi lainnya”.

Pada tanggal 16 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Keberadaan pagar laut di wilayah pesisir termasuk dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil dari garis pantai, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan hingga 4 mil dari garis pantai”. Pada elemen Treatment Recommendation, Radarbanten.co.id mengarahkan solusi pada perlunya penegakan hukum, evaluasi kebijakan, serta peningkatan peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik pagar laut. Solusi yang ditawarkan dalam pemberitaan menekankan pentingnya mekanisme kebijakan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir.

Pada tanggal 19 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Presiden Indonesia kedelapan itu lebih memilih memihak kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya para nelayan dibandingkan kepentingan kaum elite. “Langkah tepat dan tegas ini membuktikan jika Presiden kita mendengar, memerhatikan, dan tentu memihak rakyat-rakyat kecil dalam hal ini nelayan yang hidup dari mata pencahariannya di lautan,” ucapnya. Pada tanggal 22 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing “Setelah pembongkaran dan pembatalan SHGB dan SHM atas laut itu, harus segera diungkap hasil pemeriksaan perihal motif dan tujuan pemagaran laut yang meresahkan tersebut. Semoga aparat dapat segera mengumumkan hasil penyelidikannya dan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran,”ungkap Jazuli, Rabu 22 Januari 2025.

Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Setelah melakukan peninjauan dan memastikan bahwa area yang dipagari merupakan wilayah perairan laut, sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berada di sekitar lokasi tersebut kemudian dinyatakan batal. Pada tanggal 24 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ke Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, disambut respons dari warga nelayan setempat. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi dan permohonan bantuan kepada Nusron Wahid terkait upaya memperoleh keadilan atas hak tanah yang diduga telah dikuasai oleh pihak spekulan.

Pada tanggal 27 Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Kejaksaan Agung Republik Indonesia, melalui Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor PRIN-01/F.2/Fd.1/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025, meminta bantuan untuk penyediaan dokumen berupa Buku Letter C Desa Kohod yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas area pemasangan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, beserta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Pada tanggal 31

Januari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Nusron menjelaskan bahwa pencopotan dan pemberian sanksi berat ini dilakukan setelah audit investigasi internal terkait penerbitan SHGB tersebut. Audit dilakukan dengan memerintahkan Dirjen SPPR untuk memanggil Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam proses pengukuran, serta pihak-pihak terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, termasuk kepala seksi dan kepala kantor yang sudah pensiun.

Pada tanggal 4 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa dalam upaya penegakan hukum, Ombudsman menilai perlu adanya langkah lanjutan dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki dan menuntaskan dugaan tindak pidana tersebut secara menyeluruh. Pada tanggal 16 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat atau memalsukan surat sehingga tampak seolah-olah dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dengan maksud agar surat tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu, dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Pada tanggal 19 Februari 2025 Radarbanten.co.id melakukan framing Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang.

Pemberitaan RadarBanten.co.id terkait kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang memperlihatkan kecenderungan framing yang menempatkan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sebagai fokus utama. Hal tersebut tercermin dari pola pemberitaan yang relatif konsisten dalam mendefinisikan persoalan (*define problem*), mengidentifikasi faktor penyebab (*diagnose causes*), memberikan penilaian normatif (*make moral judgment*), serta mengemukakan alternatif penyelesaian (*suggest remedies*) dalam struktur teks berita.

Dalam konteks *define problem*, media cenderung memosisikan isu pagar laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan atau penataan kawasan pesisir, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan pengelolaan ruang laut serta dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak aparat daerah. Pagar laut direpresentasikan sebagai simbol pembatas akses publik terhadap wilayah laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat nelayan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Berger dan Luckmann (1967) yang menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung melalui interaksi antarindividu dalam masyarakat.

Penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam pemberitaan menunjukkan adanya penilaian normatif yang berpihak pada masyarakat. Istilah-istilah seperti “kerugian nelayan,” “penguasaan kawasan laut,” “cacat prosedur,” dan “pelanggaran hukum” mengandung makna evaluatif yang secara implisit mengarahkan pembaca pada kesimpulan bahwa pembangunan pagar laut bermasalah secara hukum dan etis. Pilihan bahasa ini memperkuat elemen *make moral judgment* dalam model framing

Robert N. Entman, di mana media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi membangun penilaian moral terhadap aktor dan kebijakan yang terlibat.

Dalam elemen (*diagnose causes*), Radar Banten secara konsisten mengatribusikan penyebab konflik pada lemahnya pengawasan pemerintah, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta praktik maladministrasi dalam penerbitan sertifikat di wilayah perairan. Dengan konstruksi ini, masyarakat pesisir tidak diposisikan sebagai penyebab masalah, melainkan sebagai korban dari kegagalan tata kelola negara. Framing semacam ini memperjelas posisi ideologis media yang menempatkan negara menjadi aktor utama yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik.

Rekomendasi solusi (*suggest remedies*) yang ditampilkan dalam pemberitaan Radar Banten selaras dengan kepentingan masyarakat pesisir. Media mendorong penegakan hukum, pembatalan sertifikat bermasalah, pembongkaran pagar laut, serta perlunya dialog dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Solusi yang dikonstruksikan tidak mengarah pada legitimasi proyek pembangunan, melainkan pada pemulihan hak masyarakat dan perbaikan tata kelola yang lebih adil dan transparan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis framing pemberitaan kasus Pagar Laut di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada media radarbanten.co.id periode Januari–Februari 2025 menggunakan model framing Robert N. Entman, disimpulkan bahwa media radarbanten.co.id konsisten membingkai isu Pagar Laut sebagai persoalan sosial, lingkungan, dan kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Pendekatan framing ini menunjukkan bahwa media dapat memainkan peran membentuk opini publik dan persepsi mengenai suatu isu atau konflik, terutama konflik Pagar Laut Tangerang. Dengan penyampaian pesan dan penekanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara pembaca memahami dan merespon konflik tersebut.

Saran untuk media adalah untuk membuat berita sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme, dengan mengedepankan keadilan, akurasi dan keberimbangan dalam melaporkan pemberitaan konflik yang terjadi di masyarakat. Menjadi media yang tidak memihak pihak mana pun dan memberikan sudut pandang yang adil dari berbagai sisi. Karena, hal itu dapat berpengaruh terhadap perspektif pembaca mengenai konflik politik yang terjadi. Karena peran media jurnalistik penting bagi pembaca, media merupakan *watcdog* atau pengawas pemerintah demi memperhatikan kepentingan publik.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). CV. syakir Media Press.
- Ariyani, N., & Latief, S. S. (2025). Analisis Framing Berita Ibu Kota Nusantara di kaltimoday.co Framing Analysis of Nusantara Capital News at

- Kaltimtoday.Co. Cite This: *J.SST*, 4(2), 230–240.
<https://doi.org/10.31960/tea.v5i1>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Knopf Doubleday Publishing Group.
https://books.google.co.id/books/about/The_Social_Construction_of_Reality.html?hl=id&id=BEEh1Stk5NIC&redir_esc=y
- Efendi, E., Rambe, S., Lubis, H. A., & Agustina, S. (2023). Menulis Isi Berita dan Feature. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 Nomor 1 Tahun 2023, 2086–2090
- Effendy, E., Zakaria, Azlisa, & Anggarana. (2023). Dasar Dasar Penulisan Berita. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5 Nomor 2 Tahun 2023.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing Konstruksi Ideologi Dan Politik Media*. Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang, 2012.
https://www.google.co.id/books/edition/ANALISIS_FRAMING_Konstruksi_Ideologi_dan/0nBaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In *Journal of Communication* (Vol. 43, Issue 4).
- Faujiah, N. A., & Rubiyannah. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Kulon Progo terkait Pembangunan Bandara Yia Pada Medcom.id dan Tirto.id. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 2, 72–80.
<https://doi.org/10.15408/jsj.v2.14576>
- Goffman, E. (1974a). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Harvard University Press,
<http://thowe.pbworks.com/w/file/51478347/Goffman.Frame.Analysis.pdf>
- Hidayatulloh, N. F. (2020). *Analisis framing pemberitaan sengketa Gunung Kelud pada media online kedirtribunnews.com dan blitartimes.com Periode 2015*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustakim, Y. (2022). *Analisis Perbandingan Framing Pemberitaan Kampung Bayam Dalam Konflik Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) Pada Republika.co.id. dan CNN Indonesia*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Putri, S. H., & Yusian, S. A. (2018). Fungsi Media Massa Dalam Hegemoni Media. *Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 1.
<https://repository.unibi.ac.id/236/1/FUNGSI%20MEDIA%20MASSA%20DALAM%20HEGEMONI%20MEDIA.pdf>
- Sari, M. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kampus (Studi Mahasiswa Prodi PPI FUSI UINSU). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2).
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya331>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta, Bandung.
- Syafiq, M. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Rempang Eco City Pada Media Batamnews.co.id dan Wartakepri.co.id*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.